

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI  
PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN PERAN  
PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:  
**Prita Dilla Anggraeni**  
NIM. 15.0102.0139

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2019**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI  
PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN PERAN  
PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh:

**Prita Dilla Anggraeni**

NIM. 15.0102.0139

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2019**

# SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN,  
PENGAWASAN, DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


**Prita Dilla Anggraeni**

**NPM 15.0102.0139**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal **25 Juli 2019**


Susunan Tim Penguji

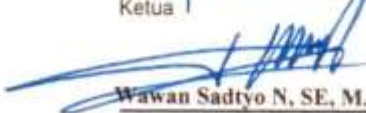
Pembimbing

  
**Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc. Ak.**  
Pembimbing I

\_\_\_\_\_  
Pembimbing II

Tim Penguji

  
**Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc. Ak.**  
Ketua

  
**Wawan Sadyo N, SE, M.Si, Ak, CA**  
Sekretaris

  
**Veni Soraya Dewi, SE, M.Si.**  
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **19 AUG 2019**

  
**Dra. Marling Kurnia, MM**

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Prita Dilla Anggraeni  
NIM : 15.0102.0139  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI  
PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN PERAN  
PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 19 Juli 2019

METERAI  
TEMPEL  
57354AFF900390144  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Surat Pernyataan

Prita Dilla  
NIM. 15.0102.0139



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Prita Dilla Anggraeni  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 25 September 1997  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Magersari Timur Rt 11, Rw 09, Kota Magelang  
Alamat Email : pritadilla2019@gmail.com  
Pendidikan Formal :  
SD (2003- 2009) : SD Magersari 2 Megelang  
SMP (2009-2012) : SMP Negeri 8 Magelang  
SMA (2012- 2015) : SMA Negeri 2 Magelang  
Perguruan Tinggi(2015-2019): S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Magelang  
Pendidikan Non Formal :  
- *Basic Listening dan Speaking Course* di UMMagelang *Language Center*  
- Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer  
UMMagelang  
Pengalaman Organisasi  
- Komunitas Mahasiswa Enterpreneur (KOMET)

Magelang, 19 Juli 2019  
Peneliti



Prita Dilla Anggraeni  
NIM.15.0102.0139

## **MOTTO**

Sesungguhnya beserta dengan Kesukaran adalah Kemudahan  
(Al-Insyirah:6)

Jangan lupa berbagi karena kebahagiaan tidak akan pernah habis jika dibagi  
(Ummu Fatih)

Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun  
jika tak serius kamu hanya akan menemukan alasan  
(Jim Rohn)

Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka  
ia akan memanfaatkanmu  
(Hadis Riwayat Muslim)

Saya tidak bisa mengubah arah angin, namun saya bisa menyesuaikan pelayaran  
saya untuk selalu menggapai tujuan saya  
(Jimmy Dean)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “ **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran).**”

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, Ak, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang, sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Wawan Sadtyo N., S.E, M.Si, Ak, CA selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Veni Soraya Dewi, S.E, M.Si. selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan didalam perbaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Keluarga tercinta terutama Ibu Mutiah, Bapak Priyanto yang telah memberikan dukungan materi dan moril dan adik saya tercinta Muhammad Naufal Faras Saputra yang telah turut membantu kelancaran studi saya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Magelang, 19 Juli 2019

Peneliti



Prita Dilla Anggraeni  
NIM.15.0102.0139

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataaan.....	iii
Riwayat Hidup .....	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Abstrak .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS .....</b>	<b>15</b>
A. Telaah Teori .....	15
1. Teori Stewardship (Stewardship theory) .....	15
2. Pengelolaan Dana Desa .....	16
3. Akuntabilitas.....	18
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	20
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	21
6. Partisipasi Penganggaran.....	22
7. Pengawasan .....	23
8. Peran Perangkat Desa.....	25
B. Telaah Penelitian Sebelumnya .....	26
C. Perumusan Hipotesis.....	28



D. Model Penelitian .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	37
B. Populasi dan Sempel .....	37
C. Variabel penelitian dan Pengukuran variabel .....	38
D. Metode Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Statistik Deskriptif Data.....	46
B. Statistik Deskriptif Responden.....	46
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	48
D. Uji Kualitas Data.....	50
E. Analisis Regresi Linier Berganda .....	52
F. Uji Hipotesis.....	53
G. Pembahasan.....	58
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Keterbatasan Penelitian.....	69
C. Saran.....	69
Daftar Pustaka .....	70
Lampiran .....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang .....	4
Tabel 1.2 Rincian Dana Desa Kecamatan Kajoran .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya .....	26
Tabel 3.1 Definisi dan Pengukuran Variabel .....	38
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	46
Tabel 4.2 Profil Responden.....	47
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	48
Tabel 4.4 <i>Cross Loading</i> .....	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas .....	52
Tabel 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda .....	53
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi.....	53
Tabel 4.8 Uji F .....	54
Tabel 4.9 Uji t .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian .....	36
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	44
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	45
Gambar 4.1 Gambar Uji F.....	55
Gambar 4.2 Kurva Penerimaan Uji t Variabel KSDM .....	56
Gambar 4.3 Kurva Penerimaan Uji t Variabel PTI .....	56
Gambar 4.4 Kurva Penerimaan Uji t Variabel PP.....	57
Gambar 4.5 Kurva Penerimaan Uji t Variabel P.....	57
Gambar 4.6 Kurva Penerimaan Uji t Variabel PPD.....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	75
Lampiran 2 Daftar Sampel di Kantor Desa Se-Kecamatan Kajoran.....	81
Lampiran 3 Tabulasi Data Kuesioner (Data Mentah).....	82
Lampiran 4 Tabulasi Data Kuesioner (Data Diolah).....	97
Lampiran 5 Statistik Deskriptif.....	109
Lampiran 6 Tabel <i>Cross Loading</i> .....	110
Lampiran 7 Uji Validitas.....	112
Lampiran 8 Uji Reliabilitas.....	118
Lampiran 9 Analisis Regresi.....	119
Lampiran 10 Bukti Penerimaan dan Pengambilan Kuesioner.....	120
Lampiran 11 Surat Ijin Penelitian.....	123

## ABSTRAK

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI  
PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN PERAN  
PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)**

Oleh:

**Prita Dilla Anggraeni**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Kajoran. Metode pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 134 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji-F dan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata kunci:** *Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya, khususnya bidang pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah untuk mendorong pelaksanaan sistem desentralisasi sebagai upaya pembangunan negara. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Desa merupakan unit sistem pemerintahan, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa berupa pemberian anggaran khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk Dana Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Adapun pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, adanya alokasi dana desa semestinya menjadikan

pengelolaan keuangan desa akan semakin transparandan akuntabel, baik dalam proses pencatatan, pengelolaan serta pelaporan.

Tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar evaluasi. Dengan demikian akan mempermudah pengambilan keputusan ekonomi untuk melaksanakan kegiatan di masa selanjutnya. Oleh karena itu penyampaian laporan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang berterima umum. Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bupati Kabupaten Magelang berharap kepada pemerintah desa khususnya Kepala Desa untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan dana desa agar sesuai tujuan dan sasaran. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa dapat dilihat dari tingkat kenaikan dana desa yang diberikan setiap tahunnya. Adapun dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah Pusat sebesar Rp20 triliun pada tahun 2015, pada tahun 2016 Rp47 triliun dan di tahun 2017 sebesar Rp60 triliun. Berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih ditemukan adanya kelemahan terkait pengelolaan dana desa di Provinsi Jawa Tengah (*Semarang.bpk.go.id*). Permasalahan tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Selain itu juga ditemukan bahwa *monitoring* dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa masih belum optimal. Sehingga masih perlu adanya regulasi dari pemerintah pusat khususnya terkait pengawasan pengelolaan dana desa serta program pelatihan untuk aparat desa.

Semakin besar Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat maka semakin besar pula tanggungjawab bagi pemerintahan desa. Besar dana desa yang diperoleh akan memicu terjadinya penyelewengan sehingga rawan akan terjadinya korupsi. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait praktik korupsi penggunaan dana desa selama tahun 2016 sampai dengan 2017 telah ditemukan 110 kasus korupsi, dimana terdapat 107 pelaku merupakan Kepala Desa (<https://antikorupsi.org>). Sedangkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) tindak korupsi pada tingkat Desa bukan karena tindak kejahatan Kepala Desa, namun karena ketidakpahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kenaikan jumlah pengalokasian dana desa mewajibkan setiap Desa dapat mengelolanya secara mandiri, efektif dan efisien. Kebijakan tersebut



memberikan konsekuensi terhadap pengelolaan yang harus dilakukan berdasar prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Adapun besar dana tiap kecamatan di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Kecamatan	Dana Desa	Persentase (%)
1	Salaman	15.859.221.000	5,55%
2	Borobudur	14.976.696.000	5,25%
3	Ngluwar	6.266.185.000	2,19%
4	Salam	9.311.645.000	3,26%
5	Srumbung	12.422.164.000	4,35%
6	Dukun	10.895.873.000	3,82%
7	Sawangan	11.985.140.000	4,20%
8	Muntilan	10.251.655.000	3,59%
9	Mungkid	11.069.661.000	3,88%
10	Mertoyudan	9.733.870.000	3,41%
11	Tempuran	11.903.620.000	4,17%
<b>12</b>	<b>Kajoran</b>	<b>22.632.111.000</b>	<b>7,93%</b>
13	Kaliangkrik	16.090.053.000	5,63%
14	Bandongan	9.889.129.000	3,46%
15	Candimulyo	15.174.794.000	5,31%
16	Pakis	15.947.135.000	5,58%
17	Ngablak	12.576.628.000	4,40%
18	Grabag	22.330.204.000	7,82%
19	Tegalrejo	16.116.194.000	5,64%
20	Secang	14.171.920.000	4,96%
21	Windusari	15.934.873.000	5,58%
<b>Total</b>		<b>285.538.771.000</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2017.*

Berdasarkan tabel 1.1 dana desa terbesar di tahun 2017 diberikan kepada Kecamatan Kajoran, sedangkan Kecamatan dengan perolehan dana desa terendah adalah Kecamatan Ngluwar. Alokasi dasar dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk tiap desa per kecamatan yang ada di

Kabupaten Magelang sebesar Rp720.442.000. Sedangkan besar dana desa yang diterima setiap desanya berbeda berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing desa. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 tahun 2018 pasal 6 menjelaskan bahwa besar dana desa yang diperoleh setiap desa didasarkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat kemiskinan, letak geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk. Adapun presentase pembagian dana desa tersebut yaitu untuk alokasi dasar sebesar 77% dari Pagu anggaran, dan untuk alokasi formula sebesar 20%, serta 3% untuk alokasi afirmasi diperuntukan bagi desa tertinggal dan desa dengan penduduk miskin terbanyak.

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kajoran antara lain banyaknya perangkat desa yang masih minim pengetahuan tentang regulasi dan aturan pengelolaan dana desa. Hal ini mengakibatkan penyelesaian laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa tahap pertama di Kecamatan Kajoran mengalami keterlambatan pelaporan. Selain itu pada salah satu desa yang ada di Kecamatan Kajoran terindikasi adanya tindakan penyelewengan, dimana transparansi dana pembangunan tidak jelas serta pemanfaatan dana desa juga tidak terbuka. Kecamatan Kajoran merupakan salah satu kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Magelang dengan luas wilayah 83,41km<sup>2</sup> yang terbagi atas 29 Desa (*sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang*). Adapun besarnya anggaran dan realisasi capaian untuk dana desa di kecamatan Kajoran pada tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Rincian Dana Desa Kecamatan Kajoran**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	Wonogiri	787.613.000	787.613.000
2	Kwaderan	789.545.000	632.662.409
3	Madukoro	757.165.000	651.161.900
4	Bumiayu	758.217.000	598.991.430
5	Madugondo	748.169.000	748.169.000
6	Ngargosari	760.788.000	707.532.840
7	Ngendrosari	758.874.000	758.874.000
8	Lesanpuro	775.764.000	775.764.000
9	Banjaretno	781.594.000	758.146.180
10	Krinjing	793.758.000	730.257.360
11	Bangsri	761.772.000	761.772.000
12	Wadas	758.528.000	758.528.000
13	Kajoran	788.961.000	788.961.000
14	Mangunrejo	759.836.000	759.836.000
15	Sambak	768.072.000	752.710.560
16	Bambusari	762.329.000	724.212.550
17	Wuwuharjo	807.639.000	484.583.400
18	Pandansari	774.091.000	774.091.000
19	Pandanretno	809.358.000	809.358.000
20	Krumpakan	760.161.000	585.323.970
21	Banjaragung	767.470.000	735.159.513
22	Sangen	754.641.000	754.641.000
23	Pucungroto	785.005.000	706.504.500
24	Sidorejo	766.622.000	452.306.980
25	Sidowangi	755.102.000	407.755.080
26	Sukomulyo	790.596.000	790.596.000
27	Sukorejo	778.861.000	778.861.000
28	Sutopati	904.222.000	851.777.124
29	Sukomakmur	867.358.000	589.803.440
<b>Jumlah</b>		<b>22.632.111.000</b>	<b>20.415.953.236</b>

*Sumber : Peraturan Bupati Magelang*

Kecamatan Kajoran memperoleh dana desa yang cukup besar setiap tahunnya. Akan tetapi rendahnya pemahaman perangkat desa menjadikan penatausahaan dan pengelolaan dana desa di Kecamatan Kajoran belum dapat dilakukan secara optimal. Permasalahan ini memicu terjadinya laporan

keuangan yang tidak akuntabel, yang dilatarbelakangi oleh ketidakpahaman aparat tentang pengelolaan dana desa. Penerimaan dana desa yang cukup besar membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat terhindar dari penyelewengan. Pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel diharapkan mampu mengubah kondisi pemerintahan menjadi demokratis dan lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai wujud komitmen pemerintah desa terhadap pelayanan publik.

Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel, selalu berhubungan dengan anggaran pemerintah daerah. Wujud dari penganggaran otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Proses operasional anggaran harus dilakukan dengan baik dan benar, oleh karena itu diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten, handal serta bertanggungjawab. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan desa maka akan meningkatkan pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh Irma (2015) menemukan bahwa pengelolaan alokasi dana desa memiliki beberapa kendala karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Hal tersebut

sejalan dengan penelitian Setiawan, dkk (2017) bahwa lemahnya sumber daya aparat desa merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa. Sedangkan penelitian dari Prasetya, dkk (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap sistem keuangan desa.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparat desa dalam mengolah data baik dari tahap perencanaan hingga ke pelaporan. Dengan bantuan teknologi informasi maka informasi yang ada akan lebih mudah didapatkan dan diolah, sehingga dapat lebih membantu tugas aparat desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan Sugiarti & Yudianto (2017) menunjukkan adanya pengaruh signifikan untuk pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh Jannah, dkk (2018) menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selain itu partisipasi penganggaran juga merupakan hal penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat dalam suatu pengambilan keputusan atas program yang dilakukan, menjadikan aktivitas yang dilakukan pemerintah desa lebih terbuka. Partisipasi anggaran juga dapat menjadi media pengendalian internal atas program yang terkait dengan pendanaan. Penelitian Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa

partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Gayatri (2019) pada Kabupaten Karangasem juga memberikan hasil bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian Kartika (2012) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

Pengawasan juga diperlukan untuk memantau kinerja pemerintahan desa. Adanya pengawasan dapat membantu terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, serta akan meminimalisir terjadinya penyelewengan. Penelitian Istiqomah (2015) di Desa Ringintunggal menunjukkan hasil bahwa kinerja BPD kurang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Adapun penelitian Wibowo (2017) memberikan hasil bahwa kurangnya peran dari masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa menjadikan pengawasan terkait pembangunan menggunakan dana desa kurang optimal. Sedangkan penelitian Lolowang, dkk (2018) menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa didukung oleh peran perangkat desa. Keterlibatan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa menjadikan lebih terbuka dan transparan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrianasari (2017) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa peran perangkat desa cukup berperan dalam akuntabilitas pengelolaan

dana desa. Wulandari, dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa terjadinya suatu konflik peran pada perangkat desa mempengaruhi peran perangkat desa yang tidak sesuai dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Saragih & Kurnia (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dengan pengelolaan keuangan desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sapartiningsih, dkk (2018) adalah sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan menggunakan semua variabel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, **Pertama** menambahkan variabel tentang Peran Perangkat Desa yang diambil dari penelitian (Setiana & Yuliani, 2017). Dipilihnya variabel Peran Perangkat Desa dikarenakan dana desa merupakan amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan Desa untuk dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara benar. Selain itu berdasarkan fenomena yang ada, pengelolaan dana desa selama ini masih kurang optimal dikarenakan kurangnya peranan dari perangkat desa. Setiap aktivitas harus dilaksanakan dengan tertib dan dapat di pertanggungjawabkan, agar dapat memberikan keyakinan kepada pemerintah selaku pemberi amanah kepada desa. Dengan demikian Peran dari Perangkat Desa sendiri cukup andil dalam mengelola keuangan desa agar dapat terwujud pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, Perangkat Desa wajib membantu dalam pengelolaan dana desa, dan tidak adalagi kepala desa yang mengelola sendiri dana desa untuk

kepentingan sepihak. Berdasarkan *Stewardship Theory* (Donaldson & Davis, 1989) yang menyatakan bahwa *steward* tidaklah termotivasi oleh tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Principals* memberi amanah kepada *steward* yaitu perangkat desa, dimana kepala desa bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan terhadap aktivitas perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk nantinya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Peran dari Perangkat Desa ini dibutuhkan agar pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan transparan. Sehingga dapat lebih meminimalisir tindakan penyelewengan dalam pengalokasian dana desa dari Pemerintah. Apabila seluruh perangkat pemerintahan desa sudah ikut berperan dalam pengalokasian dana desa maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bisa terwujud serta pelaporan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat lebih jujur dan terbuka.

**Kedua**, lokasi penelitian ini dilakukan pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang terdiri dari 29 Desa. Alasan melakukan penelitian di Kecamatan Kajoran dikarenakan perolehan dana desa setiap tahunnya mendapatkan alokasi terbesar diantara kecamatan lain yang ada di Kabupaten Magelang. Akan tetapi pengelolaan dana desa dirasakan masih kurang optimal. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Magelang realisasi capaian output untuk dana desa di Kecamatan Kajoran hanya sebesar 90% dari dana yang dianggarkan. Atas pencapaian



tersebut akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kajoran sudah dapat dikatakan baik.

Kendala atas kurang optimalnya pengelolaan dana desa di Kecamatan Kajoran dikarenakan sumber daya manusia masih terbatas dalam hal pemahaman pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penyelesaian laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa tahap pertama untuk Kecamatan Kajoran. Selain itu salah satu desa yang ada di Kecamatan Kajoran terindikasi adanya tindakan penyelewengan dana pembangunan serta adanya penyalahgunaan dana desa. Dengan demikian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kajoran masih perlu ditingkatkan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
5. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5. Untuk mengujikan menganalisis pengaruh Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

### **D. Kontribusi Penelitian**

#### 1. Kontribusi Teoritis

Melalui hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak lain.

#### 2. Kontribusi Praktis

Bagi pemerintah penelitian ini menjadi suatu referensi mewujudkan *Good Government and Good Governance*. Sedangkan Pemerintah Desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pegawai maupun pihak yang ada dalam Pemerintahan Desa agar senantiasa bekerja secara transparan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis, menjelaskan uraian landasan teori yang mendasari, pengelolaan dana desa, akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan peran perangkat desa serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis dan model penelitian.

BAB III Metode Penelitian, berisi uraian mengenai populasi dan sampel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metode analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian validitas dan reliabilitas, hasil pengujian hipotesis serta pembahasan yang didapat dari uji yang telah dilakukan.

BAB V Kesimpulan, menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Telaah Teori**

##### **1. Teori Stewardship (Stewardship theory)**

*Stewardship theory* merupakan bagian dari teori agency, menurut (Donaldson & Davis, 1989) teori *stewardship* menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. Teori *stewardship* didasari atas teori psikologis serta sosiologi para pemikir akuntansi manajemen. Teori *stewardship* memberikan sebuah asumsi filosofi dari sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan teori *stewardship* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *steward* dan *principal*.

Tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik menjadikan *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Sehingga diperlukan adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan, keterbatasan yang dimiliki *principal* mengakibatkan adanya pemberian amanah terkait pengelolaan sumber daya tersebut kepada *Steward*. Teori *stewardship* menjelaskan bentuk pola kepemimpinan dan hubungan atasan dengan bawahannya dalam

sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Kepala Desa dan Perangkat Desa (*Stewards*) cenderung termotivasi untuk berlaku sesuai keinginan dari Pemerintah (*principals*). Menurut Teori *stewardship* kepentingan bersama adalah dasar seorang *Stewards* melakukan tindakan. Sehingga apabila terdapat perbedaan kepentingan antara *principals* dan *stewards*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama untuk bertindak sesuai dengan tindakan *principals* dan demi kepentingan bersama agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam *Stewardship theory* adalah *stewards* menyalarkan tujuan sesuai tujuan *principals* namun bukan berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan.

Penerapan Teori *stewardship* digunakan karena kepercayaan dari *principals* yang diberiksan kepada Pemerintah Desa (*Stewards*) dapat terjadi jika bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya. Penggunaan teori *Stewardship* pada organisasi Pemerintahan Desa adalah untuk mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal.

## **2. Pengelolaan Dana Desa**

Dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Tujuan dari pengalokasian dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa adalah dana yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten atau kota sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang tertuang dalam APBDes sehingga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan panduan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan dan permukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan budaya.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana - prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten atau Kota. Adapun pengalokasian Dana Desa dilihat berdasarkan :

- a. Jumlah penduduk desa (25%),
- b. Angka kemiskinan desa (35%),
- c. Luas wilayah desa (10%),
- d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%).

### **3. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha untuk mempertanggungjawabkan semua

tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut (Libby, R. dan Luft, 1993) dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu.

Kedua, seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan. Ketiga, seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Menurut (Tan, 1990) seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor atau manajer atau pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan



pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu :

- a. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal),
- b. Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

#### **4. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Havesi, 2005). Kompetensi adalah kombinasi antara keterampilan, atribut personal, dan pengetahuan yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Kompetensi Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010). Penerapan sumber daya manusia berbasis kompetensi dapat dilihat dari keseluruhan proses penilaian terhadap kinerja karyawan. Peningkatan kualitas sumber daya pegawai menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan

berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.

Jika sumber daya manusia semakin berkualitas maka kinerja operasional pegawai juga akan meningkat, sehingga akan melahirkan komitmen yang kuat pada setiap karyawan. Karakteristik mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, akan mengalami kendala dalam bekerja dan mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. (Blanchard & Thacker, 2004) menyebutkan bahwa kemampuan seseorang tercermin dari seberapa baik orang tersebut dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

## **5. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (Thompson, *et.al*, 1991). Mortensen (1988) mengemukakan bahwa teknologi informasi telah menjadi suatu komponen yang tidak terpisahkan dari mekanisme suatu organisasi. Akan tetapi dengan program yang begitu canggih dan memadai perlu adanya dukungan dari personel yang

terlatih. Pasalnya dengan banyak program yang tersedia, namun akan sulit sekali jika digabung dengan personal yang tidak terlatih.

Pemanfaatan teknologi informasi dikembangkan menjadi fungsi dari organisasi, personal, sistem teknologi informasi dan perlengkapan dalam melakukan *processing*. Teknologi informasi juga bermanfaat dalam bidang akuntansi, (Supriyono, 1997) akuntan mempunyai sikap positif dan dukungan yang baik terhadap teknologi komputer untuk pengolahan data dan kepentingan audit. Terdapat sebuah hubungan antara efektivitas dari penggunaan teknologi informasi dengan hasil yang diharapkan dari pemanfaatannya tersebut. Baik efektivitas sendiri maupun ekspektasi hasil yang diharapkan akan berpengaruh pada emosional individu dan reaksi perilaku terhadap teknologi informasi.

Kinerja individual yang dicapai berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan implikasi kinerja yang lebih baik pada sistem informasi. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya pengendalian internal terhadap pengawasan program agar kinerja organisasi dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

## **6. Partisipasi Penganggaran**

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Ulum, 2004), sehingga anggaran dapat mengestimasi

aktivitas instansi di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan pemerintahan Desa yang akuntabel, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2004) yaitu wujud dari penganggaran otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengerahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Munawar, 2006) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran. Partisipasi anggaran meningkatkan identifikasi para karyawan tidak hanya dengan sasaran anggaran tapi juga dengan tujuan organisasi karena komitmen organisasi mencakup penerimaan dan kepercayaan akan nilai dan tujuan organisasi.

Oleh karena itu partisipasi anggaran dapat meningkatkan komitmen organisasi. Sehingga apabila para pemerintah daerah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap komitmen organisasi.

## **7. Pengawasan**

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar untuk merancang suatu sistem umpan balik, membandingkan kinerja

aktual dengan standar, mendeteksi terjadinya penyimpangan serta mengambil suatu tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa sumber data yang digunakan telah efektif dan efisien (Anggraeni, 2014). Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai suatu tujuan. Pengawasan berhubungan erat dengan adanya evaluasi suatu kegiatan yang mana akan dapat diketahui sejauh mana tercapai suatu kegiatan dan seberapa besar penyimpangan yang terjadi. Pengawasan pada tingkat pemerintahan dilakukan oleh sebuah lembaga yang bertugas memeriksa dan mengevaluasi. Salah satu badan yang bertugas melakukan pengawasan khususnya dalam hal keuangan yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan, sedangkan untuk tingkat pemerintahan Desa pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Adapun tugas pokok dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- a. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Hal tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 48 yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa di setiap tahun anggaran. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 51

menjelaskan bahwa keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus memuat pelaksanaan peraturan desa. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

## **8. Peran Perangkat Desa**

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik yang bercirikan demokratis juga desentralistis. Perangkat Desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang telah memiliki tugas masing-masing seperti halnya :

### **a. Sekretariat**

Sekretariat berkedudukan dibawah kepala desa dan bertugas membantu kepala desa pada bidang pelayanan teknis administrasi. Pada implementasinya sekretaris desa sendiri dibantu oleh staf umum dan staf keuangan.

b. Bagian Teknis

Bagian teknis berada di bawah kepala desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa, bagian teknis dipimpin oleh seorang KAUR (Kepala Urusan) yang terdiri atas urusan ekonomi dan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan sosial, serta urusan pemerintahan.

c. Bagian Wilayah bertugas untuk

- 1) Penyelenggara pemerintahan tingkat Dusun
- 2) Membina kehidupan masyarakat Dusun
- 3) Membina perekonomian Dusun
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Dusun
- 5) Mendamaikan perselisihan Masyarakat Dusun
- 6) Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Desa.

**B. Telaah Penelitian Sebelumnya**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sugiarti & Yudianto (2017)	Analisis faktor seperti Kompetensi Sumber Daya Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Kabupaten Karawang)Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, dan Partisipasi	Fakor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan partisipasi anggran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian sebelumnya**  
**(lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
2	Setiana & Yuliani, (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)	Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Indrianasari, (2017)	Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Desa Karang Sari, Kecamatan Sukodono)	Perangkat desa cukup berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4	Prasetya, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman dan Pengawasan terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap sistem keuangan desa, sedangkan pemahaman dan pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas sistem keuangan desa.
5	Jannah, dkk (2018)	The Influence of Human Resources, Use of Information Technology and Public Participation to the Transparency and Accountability of Village Financial Management	Sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
6	Saragih & Kurnia, (2017)	Pengaruh Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang	Perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap terhadap pengelolaan keuangan desa.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**  
**(Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
7	Sapartinin gsih, dkk(2018)	Analisis Pagaruh Kompetensi Sumber Daya Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, partisipasi penganggaran dan pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8	Dewi & Gayatri, (2019)	Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

*Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2019*

### C. Perumusan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari pemikiran dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh setiap individu (Hasibuan, 2003). Kompetensi Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010). Sumber daya manusia harus berisi tingkatan keahlian yang diperlukan, perilaku etis dan integritas. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas terkait kemampuan

seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu dalam sebuah organisasi agar tercapai suatu tujuan harus memiliki sumberdaya manusia yang kompeten.

Pada organisasi tingkat pemerintahan desa sumber daya manusia terdiri atas perangkat desa dan staffnya. Pemerintah Desa (*steward*) mempunyai kewajiban mengelola sumber daya atau dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan Pemerintah sebagai *principals* akan selalu mengontrol kinerja dari perangkat desa dalam mengeloladana desa yang diamanahkannya. Semakin handal kompetensi sumber daya manusia, maka akan semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan, keterampilan serta pelaksanaan tugasnya. Apabila pada sebuah Pemerintah Desa terdiri atas sumber daya manusia yang kompeten, maka mereka akan cenderung bertindak sesuai dengan aturan dan tugas yang diberikan. Sumber daya manusai yang kompeten akan melakukan tugasnya dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan apa yang telah diamanahkannya. Selain itu mereka juga akan melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada demi tercapainya tujuan dan sasaran. Sehingga semakin kompeten sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi maka pencapaian tujuan terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin mudah tercapai.

Hasil penelitian dari Irma (2015), Setiawan, dkk (2017), dan Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa sumber daya manusia

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia yang kompeten dapat lebih bertanggungjawab dalam melakukan aktivitas dan tugas. Sehingga semakin kompeten kualitas sumber daya manusia, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

***H1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.***

## **2. Pengaruh Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**

Teknologi informasi digunakan oleh sebuah organisasi untuk pemrosesan, dan penyimpanan informasi, serta berfungsi sebagai penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meringankan dan membantu tugas yang dilakukan seperti halnya penyusunan laporan keuangan. (Rahadi, 2007) menyatakan bahwa Teknologi Informasi mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga. Begitupula pada tingkat pemerintahan desa, pemanfaatan teknologi digunakan oleh aparat desa dalam mengelola data dan menyimpan informasi. Teknologi informasi ini juga dapat digunakan sebagai media meminimalisir kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja ataupun yang disengaja.

Berdasarkan *Stewardship theory*, *principals* yaitu pemerintah berhak meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dari Pemerintahan Desa (*steward*). Oleh karena itu Pemerintah Desa memiliki

kewajiban membuat laporan sesuai dengan peraturan serta tidak mengandung unsur yang membingungkan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa nantinya akan diberikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi menjadikan laporan keuangan disusun secara lebih andal dan relevan. Teknologi informasi mempermudah integrasi pelaporan dari Pemerintah Desa (*steward*) ke Pemerintah (*principals*). Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisir keterlambatan pelaporan kinerja pengelolaan dana desa.

Penelitian Sugiarti & Yudianto (2017), Jannah, dkk (2018) dan Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi menjadikan informasi yang didapat semakin relevan dan pendistribusian informasi lebih efektif. Sehingga dengan demikian akan meminimalisir kecurangan dalam pengalokasian dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

***H2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.***

### **3. Pengaruh Partisipasi penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kenis (1979) menyatakan bahwa partisipasi anggaran adalah tingkat keikutsertaan manajer dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban manajer yang

bersangkutan. Anggaran dibutuhkan oleh organisasi dalam hal perencanaan, memperjelas kebijakan, mempererat hubungan antar karyawan dan menciptakan keselarasan tujuan perusahaan. Keterlibatan karyawan dalam perencanaan, penyusunan, serta pengoperasian anggaran menjadikan keterbukaan dalam hal *financial* suatu organisasi. Partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan luasnya partisipasi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian dapat lebih meminimalisir tindakan penyelewengan yang mungkin terjadi.

Jika dihubungkan dengan *Stewardship theory, principals* yaitu Pemerintah memerlukan adanya partisipasi dalam melakukan perencanaan anggaran terkait dana desa. Hal ini dilakukan agar anggaran yang dibuat selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan anggaran terkait dana desa dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat setempat. Selain berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka masyarakat juga dapat mengawasi apakah penggunaan anggaran yang telah direncanakan sesuai dengan realisasinya. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran, menjadikan anggaran yang direncanakan lebih transparan sehingga akan menghindari adanya kecurangan dan manipulasi.

Hasil Sugiarti & Yudianto (2017), Sapartiningsih, dkk (2018) serta Dewi & Gayatri (2019) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi anggaran oleh masyarakat dapat menjadi media monitoring atas kinerja yang dilakukan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran menjadikan pengelolaan lebih terbuka sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

***H3. Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.***

#### **4. Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pengawasan dilakukan sebagai wujud aktivitas untuk mengoreksi apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang ditentukan. Pengawasan diarahkan untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Tujuan dari akuntabilitas itu sendiri adalah untuk memberikan dan menyajikan beberapa informasi yang diperlukan serta dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan terutama masyarakat. Dengan adanya pengawasan akan memberikan sebuah garis dari pemerintah pusat untuk mengawasi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Menurut teori *Stewardship*, Pemerintah Desa sebagai (*steward*) akan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya karena dalam mengelola dana desa akan diawasi oleh dua pihak yaitu masyarakat dan pemerintah. Adanya suatu pengawasan membantu terlaksananya kebijakan yang ditetapkan agar dapat mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Pengawasan atas kinerja Pemerintah Desa menjadi sebuah kontrol,

sehingga dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa.

Hasil Penelitian Wibowo (2017) menunjukkan hasil bahwa kurangnya peran dari masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa menjadikan pengawasan kurang optimal. Sedangkan hasil penelitian Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan menjadi sebuah kontrol atas kinerja pemerintahan desa, maka dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa harus lebih teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

***H4. Pengawasan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.***

#### **5. Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Perangkat desa merupakan unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, Perangkat Desa wajib membantu pengelolaan dana desa, dan tidak adalagi kepala desa yang mengelola sendiri dana desa untuk kepentingan sepihak. Kepala Desa dan Perangkat Desa bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan secara periodik. Keterlibatan dari perangkat desa berperan penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sesuai dengan teori *Stewardship*, bahwa *principals* memberikan wewenang kepada *steward* untuk melakukan tugas sesuai apa yang telah diamanahkannya. Kepala desa dan perangkat desa (*stewards*) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana desa serta bertanggungjawab atas pemanfaatan dana desa yang diberi oleh *principal*. Sedangkan Kepala desa bertanggungjawab sebagai pengambil keputusan atas aktivitas yang dilakukan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

Kepala desa tidak dapat mengelola keuangan desa sendiri, sehingga diperlukan bantuan dari perangkat desa. Perangkat desa yang profesional akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang berkualitas. Hubungan kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa akan menjadikan pengelolaan dana desa lebih terbuka. Kepala desa bertugas memberi masukan serta memantau kinerja dari perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Sehingga dengan demikian adanya keterlibatan perangkat desa, maka akan mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kerjasama antara kepala desa dan perangkat desa menjadikan tujuan organisasi berupa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud.

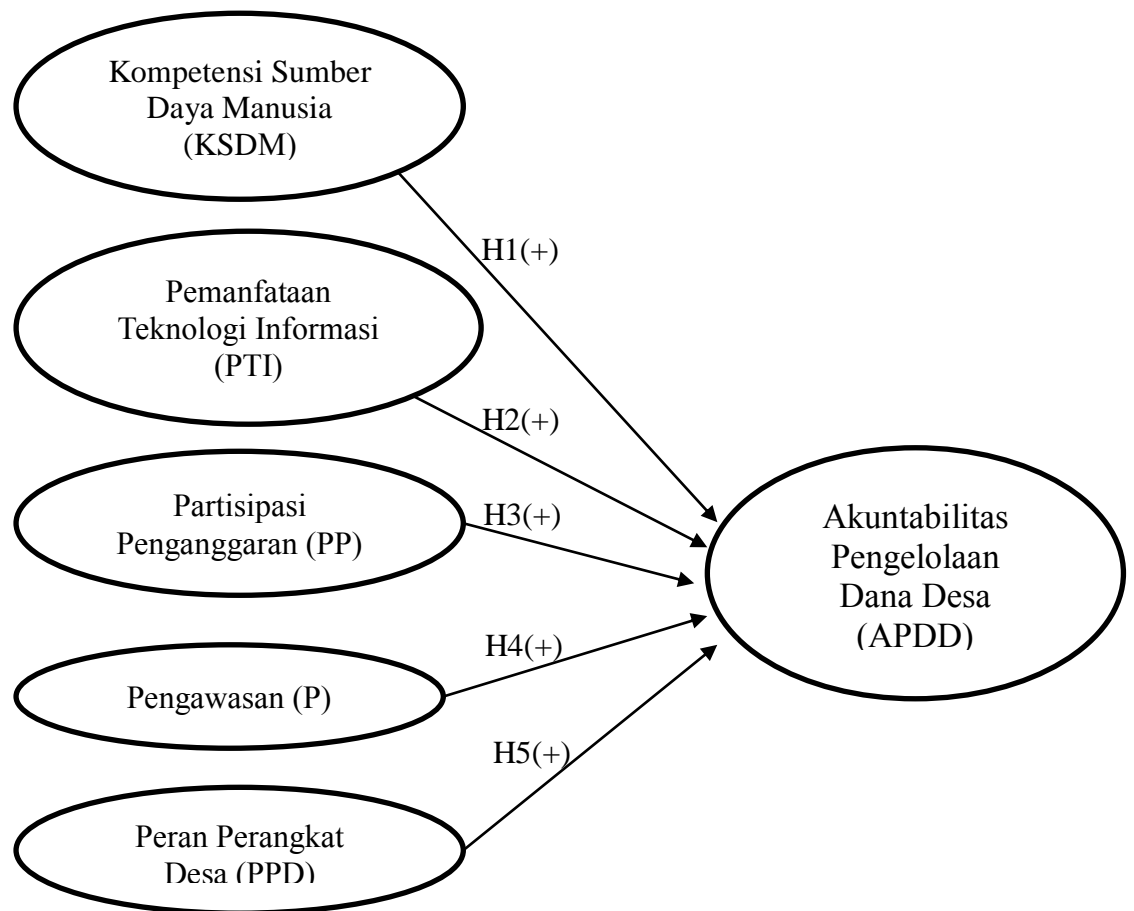
Penelitian Indrianasari (2017), Wulandari, dkk (2017) dan Setiana & Yuliani (2017) menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berperannya



perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan semakin berkualitas dan transparan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

*H5. Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa*

#### D. Model Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan sumber data primer dimana data diperoleh dan dikumpulkan melalui pengisian kuesioner kepada responden. Data diperoleh secara langsung dari responden di kantor Desa yang ada di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dengan menyebarkan kuesioner kepada Kepala desa serta staff yang ada di Kantor Desa tersebut.

### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Desa se-Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 29 Desa di Kecamatan Kajoran yang mendapatkan Dana Desa. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perangkat Desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan dan kasi kersa.
2. Memiliki masa kinerja minimal 1 tahun.
3. Tingkat pendidikan minimal SMP/ sederajat.

### C. Variabel penelitian dan Pengukuran variabel

**Tabel 3.1**  
**Definisi dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
<b>Variabel Dependen</b>		
1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD)	Kewajiban kepala desa dan aparat desa ( <i>steward</i> ) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada ( <i>principals</i> ) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban(Supadmi & Saputra, 2018).	Instrumen penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan 16 pertanyaan yang diadopsi dari (Setiana & Yuliani, 2017) dengan indikator 4 aspek perencanaan, 9 aspek pelaksanaan dan 3 aspek penatausahaan dalam pengelolaan dana desa, yang diukur menggunakan skala likert 1-5.
<b>Variabel Independen</b>		
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)	Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010)	Instrumen penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan 7 pertanyaan yang diadopsi dari Sapartiningsih, dkk(2018) dengan indikator 5 aspek pemahaman pengelolaan dana desa dan 2 aspek pengalaman serta kode etik sebagai perangkat desa yang diukur menggunakan skala likert 1–5
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	Manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (Thompson, <i>et.al</i> , 1991).	Instrumen penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan 5 pertanyaan yang diadopsi dari Sapartiningsih, dkk(2018) dengan indikator 3 aspek pemahaman terkait teknologi informasi dan 2 aspek tentang kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan komputer untuk mengelola dana desa yang diukur menggunakan skala likert 1–5.

**Tabel 3.1**  
**Definisi dan Pengukuran Variabel**  
**(Lanjutan)**

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
3. Partisipasi Penganggaran (PP)	Pengaruh keterlibatan seorang individu dalam proses perencanaan anggaran (Milani, 1975).	Instrumen penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan 4 pertanyaan yang diadopsi dari Sapartiningsih, dkk(2018) dengan indikator aspek kontribusi dalam penyusunan APBDes oleh perangkat desa, yang diukur menggunakan skala likert 1–5.
4. Pengawasan (P)	Upaya sistematis penetapan standar kinerja untuk merancang sistem umpan balik, membandingkan kinerja aktual dengan standar, mendeteksi penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin sumber data yang digunakan efektif dan efisien (Anggraeni, 2014).	Instrumen penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan 4 pertanyaan yang diadopsi dari Sapartiningsih, dkk(2018) dengan indikator 2 aspek pengawasan eksternal dan 2 aspek pengawasan internal kontribusi dalam penyusunan APBDes oleh perangkat desa, diukur menggunakan skala likert 1–5.
5. Peran Perangkat Desa (PPD)	Keterlibatan perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa tersebut. Selain berperan dalam menjalankan roda pemerintahan perangkat desa juga memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa yang cukup besar (Irma, 2015).	Instrumen penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan 6 pertanyaan yang diadopsi dari (Setiana & Yuliani, 2017) yang diukur menggunakan skala likert 1–5.

*Sumber : data penelitian terdahulu diolah, 2019*

## **D. Metode Analisis Data**

### **1. Statistik deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik analisis untuk memberikan gambaran tentang jumlah kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Statistik deskriptif memberikan gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap variabel yang sedang diteliti. Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap variabel yang ada pada variabel yang diteliti.

### **2. Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pernyataan dalam penelitian ini adalah *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Tujuannya untuk menguji apakah indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruknya atau tidak.

Alat uji yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus  $> 0,50$  untuk dapat dilakukan analisis faktor dan *cross loading*  $> 0,50$  untuk menentukan kevalidan dari setiap item pernyataan (Ghozali, 2018:31).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Pengujian reliabilitas masing-masing instrumen peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha* ( $\alpha$ ). Jika koefisien *cronbach alpha* ( $\alpha$ )  $> 0,70$  maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien *cronbach alpha* ( $\alpha$ )  $< 0,70$  maka pertanyaan dinyatakan tidak andal (Ghozali, 2018:45).

### 3. Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi anggaran, pengawasan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan

dana desa. Adapun model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$APDD = a + \beta_1 KSDM + \beta_2 PTI + \beta_3 PP + \beta_4 P + \beta_5 PPD + e$$

Keterangan :

KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

PP = Partisipasi Penganggaran

P = Pengawasan

PPD = Peran Perangkat Desa

APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

$\beta$  = koefisien regresi

a = konstanta

e = Error

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji $R^2$

Uji  $R^2$  digunakan untuk mengetahui kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi  $R^2$  adalah antara nol sampai 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai  $R^2$  mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan *adjusted*  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1. Jika

nilai adjusted  $R^2$  semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model.

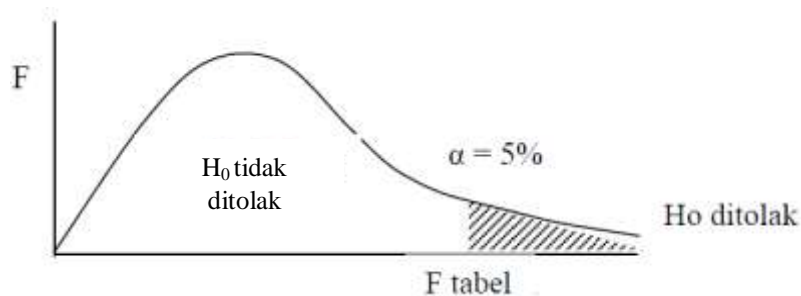
b. Uji f (*Goodness of fit*)

Uji statistik f pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of fit*). Uji f menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2018:98). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji f adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang  $df = k$  dan derajat kebebasan penyebut ( $df = n - k - 1$ ) dimana k adalah jumlah variabel bebas, pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika  $f_{hitung} > f_{tabel}$ , atau  $p\ value < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima artinya model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2) Jika  $f_{hitung} < f_{tabel}$ , atau  $p\ value > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  tidak ditolak atau  $H_a$  tidak diterima, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan dikonfersikan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam.



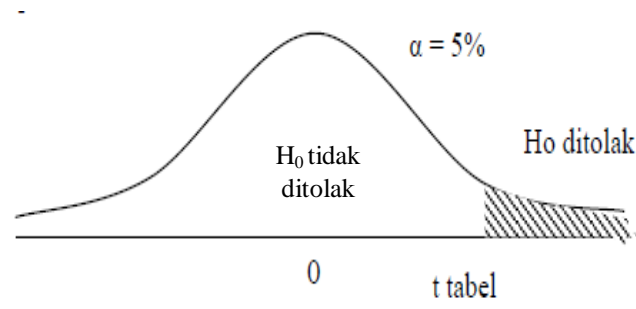


**Gambar 3.1**  
**Penerimaan Uji f**

c. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = n-1$  (Ghozali, 2018:98).

- a) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , atau  $p\ value < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , atau  $p\ value > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  tidak ditolak dan  $H_a$  tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



**Gambar 3.2**  
**Penerimaan Uji t**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel yang diambil yaitu desa se-kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 134 kuesioner yang dapat diolah.

Hasil uji determinasi *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa memberikan sumbangan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa meskipun dalam pengujian menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan faktor-faktor lain diluar model penelitian ini. dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau diluar model penelitian ini. Jadi yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan teori *Stewardship* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan, artinya dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan *stewards* mampu menyelaraskan tujuan *principals* demi tercapainya organisasi. Sedangkan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini memiliki tingkat validitas yang rendah hal tersebut dikarenakan jawaban responden pada beberapa item pernyataan menjawab netral.
2. Sampel yang digunakan hanya di desa se-kecamatan Kajoran, sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang.
3. Penelitian ini hanya meneliti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa serta masih banyak variabel lain yang belum diteliti.

## **C. Saran**

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar kuesioner diuji terlebih dahulu sebelum disebar kepada responden agar tingkat validitas dan reliabilitasnya tinggi.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan menambahkan sampel desa se Kabupaten Magelang sehingga mudah untuk menggeneralisasikan hasil penelitian.
3. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti sistem pengendalian intern (Yesinia, dkk, 2018), komitmen organisasi (Aulia, 2018), dan kepemimpinan kepala desa (Dewi & Gayatri (2019).

### Daftar Pustaka

- Abdul, K. 2010. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Intern pada PT. AVIA AVIAN. Tesis
- Anggraeni, P. 2014. Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah. *Jurnal EMBA*, 2.
- Aulia, Putri. 2018. Pemngaruh Kompetensi Aparat PEngelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat. terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB*, 1.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. 2017.
- Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. 2004. *Effective Training: System, Strategies, and Practices. Second edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dewi, N. K. A. J. P. D., & Gayatri. 2019. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269–1298.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. *Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management*. Washington, DC.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, B. I. 2013. *Mengenal Perangkat Desa*.
- Hasibuan, M. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haveasi, G. A. 2005. Standards for internal Conttrol in New York Sate Government. [www.osc.state.ny.us](http://www.osc.state.ny.us).
- <https://antikorupsi.org/news/cegah-korupsi-dana-desa>. Diakses 16 Maret 2019
- <http://semarang.bpk.go.id/?p=13801>. Diakses 16 Maret 2019
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4032-kpktahan-lima-tersangka-dugaan-suap-kajari-pemekasan>. Diakses 16 Maret 2019
- Idward, N. N. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, TEknologi Informasi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). Skripsi

- Indrianasari, N. T. 2017. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(02).
- Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, (33), 121–137.
- Istiqomah, S. 2015. Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume*, 3(1).
- Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. 2018. The Influence of Human Resources , Use of Information Technology and Public Participation to the Transparency and Accountability of Village Financial Management. *International Journal of Scientific Research and Management*, 06(05), 373–385.
- Kardiyono. 2017. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Penelitian di Desa Karangwuni Kecamatan Rangkop Kabupaten Gunungkidul). Tesis.
- Kartika, R. S. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Participation In Managing Allocation Fund Village ( ADD ) Tegeswetan Village And Village. *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 179–188.
- Kenis, I. 1979. The Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitude and Performance. *The Accounting Review*, (4), 707–721.
- Libby, R. dan Luft, J. 1993. Determinants of judgement performance in accounting settings: ability, knowledge, motivation and environment. *Accounting, Organizations and Society*, 425–450.
- Lolowang, F. J., Rompas, W. Y., & Mambo, R. 2018. *Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Kayuwu Satu Kecamatan Kawangkoan Barat*.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajmen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Milani, K. W. 1975. The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and attitudes: a Field Study. *The Accounting Review*, 50(2), 274–284.
- Mortensen, E. 1988. *Personal Computers: Tools Par Excellence*. The office.
- Munawar. 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang*.
- Nainggolan, F. A. 2018. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten

Deli Serdang). Skripsi

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2017 Alokasi Dana Desa*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 14 Tentang Penggunaan Dan Pelaksanaan Dana Desa.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Formulasi Perhitungan Alokasi Dana Desa.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Alokasi Pengelolaan Keuangan Desa.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

Paradenti, E., Kawung, E. J. R., & Zakarias, J. D. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengawasan Anggaran Dana Desa.

Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, I. P. G. 2017. Pengaruh kompetensi sumber daya, pemahaman, dan pengawasan terhadap kualitas sistem keuangan desa di kabupaten buleleng 1. *Jurusan Akuntansi*, 8(2).

Pratama, R. E. 2018. Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa. Skripsi

Rahadi, D. R. 2007. Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik. *Seminar Tekhnologi*, 1978 –9777.

Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. 2018. Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1), 100–114.

- Seprizal. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 02(02).
- Saragih, N. S., & Kurnia, D. 2017. Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang. *Jurnal Mahasiswa UNSERA*, 1–9.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Research Colloquium*.
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. 2017. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya. *Jurnal Proceedings*
- Supadmi, N. ., & Saputra, D. . D. 2018. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pelaporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(2).
- Supriyono. 1997. *Akuntansi Biaya Dan Akuntansi Manajemen Untuk Teknologi Maju dan Globalisasi* (1st ed.). Yogyakarta: BPFE UGM.
- Tan, T. H. dan A. K. 1990. Accountability Effect on Auditor's Performance: The Influence of Knowledge, Problem Solving Ability and Task Complexity. *Journal of Accounting Reseach*, 2, 209–223.
- Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. 1991. Personal Computing: Toward A Conceptual Model of Utilization. *MIS Quarterly*, 125–143.
- Ulum, I. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UMM PRESS.
- \_\_\_\_\_. *Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- \_\_\_\_\_. *Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*
- Wibowo, A. G. 2017. Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonosari Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 13, 313–325.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem



Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 02(02), 1-20.

Wulandari, I., Musyarifah, S., & Asyim, A. M. 2017. Konflik Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran para Aktor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. 2018. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset(Akuntansi Riset)*. 10(01), 105-112.